

**ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
IN THE PROVINCE OF D.I YOGYAKARTA IN 2019-2021**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2019-2021**

**Muhammad Nazarudin Latief¹, Herlina Wijayanti², Iis Wijayanti³, Kumba
Digdowiseiso⁴**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3,4}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

ABSTRACT

This study examines the financial health of local governments in Yogyakarta Province's Special Region from 2019 to 2021. By calculating the independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, harmony ratio—which is determined by comparing routine expenditure to development expenditure—and growth ratio, financial performance is evaluated. The local government budget (APBD) data from 2019 to 2021 in all regencies/cities within the Special Region of Yogyakarta Province is the secondary data source for this descriptive-quantitative research project. The efficiency ratio of Local Government Finance in the Special Region of Yogyakarta Province for the period of 2019-2021 is generally classified as efficient, with ratios below 100%, except for Bantul Regency and Gunung Kidul Regency, which showed a tendency of inefficiency in 2019 with a ratio of 101%. Considering the exception of Bantul Regency, which continually observed its effectiveness ratio fall from 2019 to 2021, the effectiveness ratio generally shows swings. Moreover, the priority of routine expenditure is greater than development expenditure, evident from the harmony ratio, with the average total ratio of routine expenditure being higher at 58% compared to the 42% of development expenditure. According to the growth ratio, all local governments in Yogyakarta Province's Special Region witnessed a decrease in growth in 2020 as a result of the Covid-19 epidemic. However, growth returned to positive territory in 2021, albeit it has not yet surpassed the level of 2019. Meanwhile, the independence ratio in DI Yogyakarta shows differences between the regencies/cities. The Yogyakarta City Government has an average independence ratio of 57.8%, indicating a "moderate" degree. Other regencies' governments, on the other hand, have minimal to moderate levels of independence.

Keywords: regional financial analysis, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio, growth ratio

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta periode 2019-2021. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian yang dilihat melalui rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder melalui data APBD dari 2019 sampai 2021 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Rasio efisiensi Keuangan Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta periode 2019-2021 rata-rata tergolong efisien dengan rasio kurang dari 100% kecuali Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki kecenderungan tidak efisien pada 2019 dengan rasio 101%. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa secara umum terjadi fluktuasi, kecuali Kabupaten Bantul yang terus

mengalami penurunan rasio efektifitas dari tahun ke tahun sepanjang 2019-2021. Adapun prioritas belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan terlihat dari rasio keserasian dimana rata-rata total rasio belanja rutin lebih tinggi yakni 58% daripada belanja pembangunan yang sebesar 42%. Pada Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun setelah itu, pertumbuhan menuju angka positif pada 2021 meskipun belum mampu melebihi tahun 2019.

Sedangkan rasio kemandirian menunjukkan bahwa kabupaten/kota di DI Yogyakarta berbeda-beda. Pemkot Yogyakarta mempunyai rasio kemandirian rata-rata 57,8% yang berarti “sedang”. Sedangkan pemerintah kabupaten lain mempunyai rasio kemandirian cenderung rendah hingga sedang.

Kata Kunci: Analisis Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1999, pemerintah daerah di Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan, yaitu memiliki kewenangan lebih besar dan luas serta bertanggung jawab lebih proporsional. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Otonomi daerah juga diharapkan bisa meningkatkan layanan pada masyarakat, dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin (Sun'an & Senuk, 2015).

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), salah satu aspek yang penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah

yang memerlukan manajemen dengan kemampuan mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai Pasal 4 PP Nomor 105/2000, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai suatu proses evaluasi untuk mengukur keefektifan dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam konteks otonomi daerah, penilaian ini menjadi semakin krusial karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Stephen P. Robbins dan Rofiah (2016) mendefinisikan kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”. Sedangkan, pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan, pembangunan daerahnya, layanan kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumardjo, 2010).

Menurut Halim (2008) beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas atau keserasaian rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Indikator kinerja keuangan daerah tersebut bisa dijadikan evaluasi dan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya, selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Menurut Digdowiseiso (2023), DI Yogyakarta pada 2018-2022 adalah provinsi yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dinamis namun cenderung stabil. Kemandirian fiskal Provinsi D.I Yogyakarta secara rata-rata berada pada posisi 36,7 secara rasio ini menunjukkan Indeks Kemandirian Fiskal dikategorikan

“menuju kemandirian”. Namun rasio ketergantungan fiskal masih berada di atas > 50 persen, artinya tingkat ketergantungan fiskal Provinsi D.I Yogyakarta masih sangat tinggi.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 juga terlihat belum bisa menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal secara penuh. Tingkat kemandirian fiskal berada di < 50 yang artinya baru mulai menuju mandiri sehingga pemerintah pusat masih memiliki intervensi melalui pola hubungan konsultatif.

Fathah (2017) menyebutkan salah satu kabupaten di DI Yogyakarta yaitu Gunungkidul memiliki rasio efektivitas PAD tergolong efektif dengan rata-rata di atas 100%. Namun belum efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%.

Sedangkan rasio keserasaian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. PAD Gunungkidul tumbuh secara positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,63%. Jika dilihat dari rasio kemandirian, maka kemandirian daerah ini rendah sekali bahkan masuk dalam kategori pola hubungan Instruktif.

Rinciannya adalah sebagai berikut: tahun 2010 Rasio Kemandirian sebesar 6,71% kemudian naik menjadi 8,17% di tahun 2011. Tahun 2012 naik menjadi 8,38% dan kembali naik di tahun 2013 menjadi 9,51% dan 17,24% di tahun 2014. Walaupun rasio kemandirian keuangan naik tetapi pola hubungannya masih berkisar antara 0%-25% yaitu pola hubungan instruktif.

Siswanto et all (2022) menemukan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 49,58% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sleman

tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,89% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi.

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 32,11% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori cukup. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 111,70% dan masuk dalam kategori efektif. Rasio efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5,11% dan masuk dalam kategori sangat efisien.

Rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016- 2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 113,00% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,25% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,79% atau dapat dikatakan bahwa kontribusi BUMD cukup baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kinerja keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2021. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder melalui data APBD tahun 2019 sampai 2021 di Provinsi D.I Yogyakarta dengan pengambilan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan mendeskripsikan fakta yang ada secara sistematis. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah di wilayah Provinsi

D.I Yogyakarta diukur dengan menggunakan Rasio Penilaian Kinerja Keuangan Daerah melalui beberapa rasio yakni: (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efisiensi, (3) Rasio Efektivitas, (4) Rasio Keserasian yang dilihat melalui Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, serta (5) Rasio Pertumbuhan dengan penjabaran sebagai berikut:

1). Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data eksteren).

2). Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. . Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3). Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

4). Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Rasio keserasian diperoleh dengan menghitung dua jenis rasio, yakni:

1). Rasio Keserasian Belanja Rutin

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja rutin memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja habis konsumsi dalam satu tahun anggaran, sifatnya jangka pendek, rutin dan berulang. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja rutin yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010).

2). Rasio Keserasian Belanja Pembangunan

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan merupakan perbandingan antara total realisasi belanja pembangunan dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Belum ada patokan yang pasti mengenai Rasio Belanja

Pembangunan yang ideal terhadap APBD. Hal ini dikarenakan Rasio Belanja Pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Menurut Digdowiseiso. Et.al., 2023). Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

5). Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, kinerja pemerintah daerah melalui kinerja keuangan APBD mengalami peningkatan pertumbuhan secara positif atau sebaliknya yaitu negatif. Apabila dimasa yang akan datang terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, maka hal tersebut merupakan suatu peringatan dan indikasi penurunan kinerja keuangan pada daerah yang bersangkutan. (Mahmudi, 2019). Rasio Pertumbuhan ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Secara umum berikut postur APBD Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta:

Tabel 1. Postur APBD Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta

Wilayah	Anggaran PAD	Pembelian	Pembangunan A/B	Bantuan Penyelenggaraan	Belanja	Belanja Kritis	Belanja Pembangunan
TABUN 2020							
Dinas Di Yogyakarta	1.051.564.754.133,20	3.695.517.232.465,20	2.082.703.184.434,90	8.058.013.453.056	5.544.450.436.310	2.543.426.124.383	3.892.233.881.747
Sub. Belanja	448.744.511.461,80	3.505.189.048.773,81	981.935.473.361,63	1.618.119.131.284	2.381.581.837.902	1.681.451.417.439	1.501.448.050.444
Sub. Operasi	318.179.750.697,11	1.113.508.424.915,14	714.831.941.572,63	1.791.714.171.646	1.152.527.391.159	997.441.448.431	1.154.178.884.116
Sub. Kebutuhan	228.191.392.284,27	1.472.278.291.353,10	237.878.803.208,37	1.396.588.822.481	1.279.054.445.750	822.466.433.088	888.295.237.479
Sub. Investasi	90.000.000.000,00	2.000.000.000,00	743.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Kota Yogyakarta	696.584.188.142,80	1.501.709.443.493,37	489.647.715.500,37	1.843.098.315.082	1.174.591.313.841	837.748.113.130	778.844.680.711
TABUN 2021							
Dinas Di Yogyakarta	2.165.742.502.271,18	5.611.110.921.295,71	4.876.706.829.331,71	3.726.151.485.452	2.633.180.899.316	1.806.818.731.678	2.628.223.841.480
Sub. Belanja	489.798.331.294,00	2.104.840.681.186,42	1.574.432.812.149,42	1.574.592.299.317	2.097.789.168.702	901.676.448.149	1.188.548.720.589
Sub. Operasi	343.892.465.747,18	1.703.177.561.432,78	1.248.308.124.441,32	1.445.301.119.441	1.779.034.445.902	480.106.324.447	1.141.048.031.347
Sub. Kebutuhan	243.243.163.167,00	1.574.432.812.149,42	743.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Sub. Investasi	99.649.299.119,82	1.129.368.748.686,70	505.332.817.707,10	574.591.299.317	1.079.034.445.902	480.106.324.447	1.141.048.031.347
Kota Yogyakarta	471.770.478.866,00	1.699.710.228.814,30	561.174.171.336,08	1.876.502.737.602	1.117.990.468.488	777.606.424.221	799.898.064.221
TABUN 2021							
Dinas Di Yogyakarta	1.849.837.899.483,00	3.703.109.309.342,23	4.860.823.874.881,06	3.726.151.485.452	2.633.180.899.316	1.806.818.731.678	2.628.223.841.480
Sub. Belanja	491.781.021.081,00	2.233.303.191.351,81	1.618.119.131.284	1.618.119.131.284	2.097.789.168.702	901.676.448.149	1.188.548.720.589
Sub. Operasi	343.892.465.747,18	1.703.177.561.432,78	1.248.308.124.441,32	1.445.301.119.441	1.779.034.445.902	480.106.324.447	1.141.048.031.347
Sub. Kebutuhan	243.243.163.167,00	1.574.432.812.149,42	743.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Sub. Investasi	99.649.299.119,82	1.129.368.748.686,70	505.332.817.707,10	574.591.299.317	1.079.034.445.902	480.106.324.447	1.141.048.031.347
Kota Yogyakarta	503.019.280.900,00	1.702.210.283.910,00	505.332.817.707,10	1.079.034.445.902	1.079.034.445.902	480.106.324.447	1.141.048.031.347

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023.

Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk mengelola dan membiayai kebutuhan keuangan mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Paul Hersey dan Blanchard dalam Halim (2001:168) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

No.	Pola Hubungan	Penjelasan
1.	Pola Hubungan Instruktif	Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah
2.	Pola Hubungan Konsultatif	Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, daerah dianggap sedikit lebih mampu
3.	Pola Hubungan Partisipatif	Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, kemandirian daerah mendekati mampu
4.	Pola Hubungan Delegatif	Campur tangan pemerintah pusat tidak ada, daerah telah mandiri

Adapun pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Adapun Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Kemandirian Tahun 2019

Wiyah	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman	%	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Provinsi DI Yogyakarta	2.082.795.334.435	3.608.013.435.006	57,73%	Sedang	Partisipatif
Kab. Bantul	505.929.472.002	1.682.129.125.294	30,08%	Rendah	Konsultatif
Kab. Gunung Kidul	254.810.945.073	1.793.714.175.166	14,21%	Rendah Sekali	Instruktif
Kab. Kulon Progo	237.876.805.206	1.390.346.622.481	17,11%	Rendah Sekali	Instruktif
Kab. Sleman	972.049.575.206	1.788.227.110.597	54,36%	Sedang	Partisipatif
Kota Yogyakarta	689.049.725.509	1.045.698.912.983	65,89%	Sedang	Partisipatif
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			39,90%	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 5. Rasio Kemandirian Tahun 2020

Wiyah	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman	%	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Provinsi DI Yogyakarta	1.876.706.829.354.713	3.726.454.595.432	80,36%	Sedang	Partisipatif
Kab. Bantul	479.610.812.119.42	1.538.592.299.317	31,17%	Rendah	Konsultatif
Kab. Gunung Kidul	228.208.528.545.52	1.492.055.719.343	15,29%	Rendah Sekali	Instruktif
Kab. Kulon Progo	254.422.026.357.32	1.276.698.510.276	19,93%	Rendah Sekali	Instruktif
Kab. Sleman	788.246.742.427.73	1.617.144.005.540	48,74%	Rendah	Konsultatif
Kota Yogyakarta	563.174.371.396.88	1.076.762.737.662	52,30%	Sedang	Partisipatif
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			46,30%	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

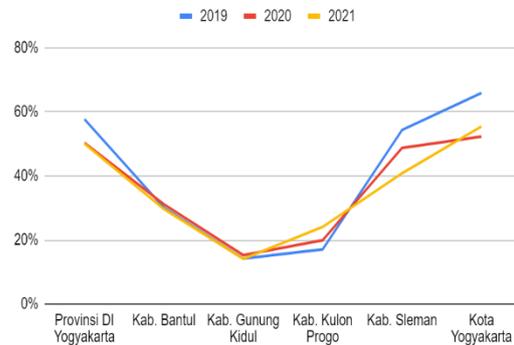
Tabel 6. Rasio Kemandirian Tahun 2021

Wiyah	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pempus/Prov dan Pinjaman	%	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Provinsi DI Yogyakarta	1.900.923.074.881	3.794.855.660.531	50,1%	Rendah	Konsultatif
Kab. Bantul	491.670.724.028	1.656.161.604.258	29,7%	Rendah	Konsultatif
Kab. Gunung Kidul	236.371.058.364	1.674.006.823.366	14,1%	Rendah Sekali	Instruktif

Kab. Kulon Progo	307.154.342.136	1.274.276.302.007	24,1%	Rendah Sekali	Instruktif
Kab. Sleman	803.679.358.719	1.968.377.573.367	40,8%	Rendah	Konsultatif
Kota Yogyakarta	563.174.371.396.88	1.076.762.737.662	52,30%	Sedang	Partisipatif
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			35,7%	Rendah	Konsultatif

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Se-Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2021



Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 4,5 dan 6 serta gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta tergolong rendah dengan rata-rata total rasio berada pada interval 25 – 50 % yakni pada tahun 2019 sebesar 39,9%, tahun 2020 sebesar 36,3%, dan tahun 2021 sebesar 35,7%.

Kota Yogyakarta meskipun fluktuatif namun memiliki tingkat kemandirian tertinggi dari tahun ke tahun dengan rasio kemandirian 65,89% di tahun 2019, 52,30% di tahun 2020 dan 55,5% di tahun 2021. Bahkan angka tersebut lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Kabupaten Gunung Kidul menjadi kabupaten dengan tingkat kemandirian terendah dari tahun ke tahun dengan rasio kemandirian 14,21% di tahun 2019, 15,29% di tahun 2020 dan 14,1% di tahun 2021. Dengan kata lain, memiliki ketergantungan sangat tinggi dengan

Pemerintah Pusat sehingga pola hubungan yang terjadi adalah instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan.

Rasio Efisiensi

Menurut Mahsun (2013) kriteria Rasio Efisiensi sebagai tabel berikut:

Tabel 7. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
$X > 100\%$	Tidak Efisien
$X = 100\%$	Efisien Berimbang
$X < 100\%$	Efisien

Adapun Rasio Efisiensi keuangan daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Efisiensi Tahun 2019

Wilayah	TAHUN 2019			
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%	Rasio Efisiensi
Provinsi DI Yogyakarta	5.544.650.430.330	5.699.357.232.441	97,3%	Efisien
Kab. Bantul	2.283.585.037.902	2.269.539.168.278	101%	Tidak Efisien
Kab. Gunung Kidul	2.132.222.291.589	2.113.060.424.939	101%	Tidak Efisien
Kab. Kulon Progo	1.671.661.810.766	1.672.270.191.535	100%	Efisien Berimbang
Kab. Sleman	2.776.995.369.323	2.840.636.285.803	97,8%	Efisien
Kota Yogyakarta	1.734.593.335.861	1.765.760.418.492	98,2%	Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi			99,1%	Efisien

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 9. Rasio Efisiensi Tahun 2020

Wilayah	TAHUN 2020			
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%	Rasio Efisiensi
Provinsi DI Yogyakarta	5.433.180.699.355,67	5.611.510.924.299,71	96,82%	Efisien
Kab. Bantul	2.093.719.168.702,17	2.104.840.663.186,42	99,47%	Efisien
Kab. Gunung Kidul	1.775.056.482.992,33	1.792.377.765.120,73	99,03%	Efisien
Kab. Kulon Progo	1.500.039.941.735,15	1.582.435.615.633,32	94,79%	Efisien
Kab. Sleman	2.532.169.209.185,59	2.541.050.870.612,73	99,65%	Efisien
Kota Yogyakarta	1.517.599.468.488,39	1.699.751.020.194,30	89,28%	Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi			96,51%	Efisien

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 10. Rasio Efisiensi Tahun 2021

Wilayah	TAHUN 2021			
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%	Rasio Efisiensi
Provinsi DI Yogyakarta	5.530.173.461.667	5.703.100.309.342	97,0%	Efisien
Kab. Bantul	2.226.588.267.595	2.235.655.701.355	99,6%	Efisien
Kab. Gunung Kidul	1.918.206.530.997	1.919.774.313.499	99,9%	Efisien
Kab. Kulon Progo	1.499.994.321.770	1.629.730.063.143	92,0%	Efisien
Kab. Sleman	2.714.312.898.540	2.793.328.384.635	97,2%	Efisien
Kota Yogyakarta	1.691.968.885.089	1.707.273.287.343	99,1%	Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi			97,5%	Efisien

Sumber : Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 8,9 dan 10 diatas dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2019-2021 rata-rata tergolong efisien dengan rasio kurang dari 100%. Namun demikian terdapat dua Kabupaten yang memiliki kecenderungan tidak efisien di tahun 2019 sebesar 101% yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Kedua Kabupaten tersebut dapat memperbaiki rasio efisiensinya di tahun 2020 dan 2021 menjadi tergolong efisien. Dengan demikian, dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dalam hal ini baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Rasio Efektivitas

Menurut Mahsun (2013), terdapat kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 11. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
$X > 100\%$	Efektif
$X = 100\%$	Efektifitas Berimbang
$X < 100\%$	Tidak Efektif

Adapun Rasio Efisiensi keuangan daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Rasio Efektivitas Tahun 2019

Wilayah	Anggaran PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%	Nilai Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	1.921.564.734.133,20	2.082.795.334.435	108%	Efektif
Kab. Bantul	448.854.251.461,00	505.929.472.002	113%	Efektif
Kab. Gunung Kidul	228.329.250.092,57	254.810.945.073	112%	Efektif
Kab. Kulon Progo	226.191.392.584,37	237.876.805.206	105%	Efektif
Kab. Sleman	867.643.469.527,46	972.049.575.206	112%	Efektif
Kota Yogyakarta	636.084.388.145,00	689.049.725.509	108%	Efektif
Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun			110%	Efektif

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 13. Rasio Efektivitas Tahun 2020

Wilayah	Anggaran PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%	Nilai Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	2.163.742.926.278,18	1.876.706.829.354,71	86,73%	Tidak Efektif
Kab. Bantul	469.798.331.294,00	479.610.812.119,42	102,09%	Efektif
Kab. Gunung Kidul	245.880.405.737,18	228.208.528.545,52	92,81%	Tidak Efektif
Kab. Kulon Progo	247.920.163.365,00	254.422.026.357,32	102,62%	Efektif
Kab. Sleman	944.481.898.316,49	788.246.742.427,73	83,46%	Tidak Efektif
Kota Yogyakarta	671.770.478.946,00	563.174.371.396,88	83,83%	Tidak Efektif
Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun			91,93%	Tidak Efektif

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 14. Rasio Efektivitas Tahun 2021

Wilayah	Anggaran PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%	Nilai Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	1.849.837.899.685,00	1.900.923.074.881	103%	Efektif
Kab. Bantul	495.767.307.797,00	491.670.724.028	99%	Tidak Efektif
Kab. Gunung Kidul	223.566.256.092,34	236.371.058.364	106%	Efektif
Kab. Kulon Progo	235.572.599.824,00	307.154.342.136	130%	Efektif
Kab. Sleman	742.548.030.568,00	803.679.358.719	108%	Efektif
Kota Yogyakarta	565.651.286.900,00	598.121.885.338	106%	Efektif
Rata-Rata Rasio Efektivitas per Tahun			109%	Efektif

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Dari tabel 12, 13 dan 14. tersebut dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah D.I Yogyakarta tergolong efektif dengan rasio efektivitas diatas 100%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi tidak efektif, dengan Kabupaten Bantul (102,09%) dan Kabupaten Kulonprogo (102,62%) saja yang mampu mempertahankan efektivitas dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Menariknya di tahun 2021, di saat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya mengalami perbaikan rasio efektifitas menjadi level efektif, Kabupaten Bantul

justru mengalami penurunan efektifitas dari 102,09% di tahun 2020 menjadi 99% di tahun 2021.

Rasio Keserasian

Penilaian kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keserasian untuk melihat prioritas alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan suatu Pemerintah Daerah. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berikut rasio keserasian belanja rutin dari realisasi APBD Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta tahun anggaran 2019-2021.

Tabel 15. Rasio Keserasian Belanja Rutin Tahun 2019

Wilayah	TAHUN 2019		
	Total Belanja Rutin	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	2.512.419.124.583	5.544.650.430.330	45%
Kab. Bantul	1.082.435.417.459	2.283.585.037.902	47%
Kab. Gunung Kidul	997.443.488.433	2.132.222.291.589	47%
Kab. Kulon Progo	822.666.453.088	1.671.661.810.766	49%
Kab. Sleman	1.341.343.612.445	2.776.995.369.323	48%
Kota Yogyakarta	957.748.353.150	1.734.593.335.861	55%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			49%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 16. Rasio Keserasian Belanja Rutin Tahun 2020

Wilayah	TAHUN 2020		
	Total Belanja Rutin	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	1.806.958.734.675,65	5.433.180.699.355,67	33%
Kab. Bantul	905.070.448.119,35	2.093.719.168.702,17	43%
Kab. Gunung Kidul	660.550.231.447,33	1.775.056.482.992,33	37%
Kab. Kulon Progo	718.762.283.164,15	1.500.039.941.735,15	48%
Kab. Sleman	1.187.800.733.923,52	2.532.169.209.185,59	47%
Kota Yogyakarta	777.600.404.250,81	1.517.599.468.488,39	51%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			43%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 17. Rasio Keserasian Belanja Rutin Tahun 2021

Wilayah	TAHUN 2021		
	Total Belanja Rutin	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI	3.255.798.174.128	5.530.173.461.667	59%

Yogyakarta			
Kab. Bantul	1.881.449.051.360	2.226.588.267.595	84%
Kab. Gunung Kidul	1.541.576.472.591	1.918.206.530.997	80%
Kab. Kulon Progo	1.229.584.199.009	1.499.994.321.770	82%
Kab. Sleman	2.266.143.510.257	2.714.312.898.540	83%
Kota Yogyakarta	1.609.100.827.024	1.691.968.885.089	95%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			81%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 15, 16 dan 17 dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian untuk Belanja Rutin Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dengan total rata-rata 49% di tahun 2020 turun menjadi total rata-rata 43% di tahun 2020. Penurunan paling rendah terjadi di Pemerintah Provinsi dari 45% di tahun 2019 menjadi 33% di tahun 2020. Namun di tahun 2021 secara keseluruhan terjadi kenaikan drastis menjadi total rata-rata 81% (kenaikan 86% dari tahun 2020) dengan kenaikan tertinggi di Kota Yogyakarta.

Tabel 18. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Tahun 2019

TAHUN 2019			
Wilayah	Total Belanja Pembangunan	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	3.032.231.305.747	5.544.650.430.330	55%
Kab. Bantul	1.201.149.620.444	2.283.585.037.902	53%
Kab. Gunung Kidul	1.134.778.803.156	2.132.222.291.589	53%
Kab. Kulon Progo	848.995.357.678	1.671.661.810.766	51%
Kab. Sleman	1.435.651.756.878	2.776.995.369.323	52%
Kota Yogyakarta	776.844.982.711	1.734.593.335.861	45%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			51%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 19. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Tahun 2020

TAHUN 2020			
Wilayah	Total Belanja Pembangunan	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	3.626.221.964.680,02	5.433.180.699.355,67	67%
Kab. Bantul	1.188.648.720.582,82	2.093.719.168.702,17	57%
Kab. Gunung Kidul	1.114.506.251.545,00	1.775.056.482.992,33	63%
Kab. Kulon Progo	781.277.658.571,00	1.500.039.941.735,15	52%
Kab. Sleman	1.344.368.475.262,07	2.532.169.209.185,59	53%
Kota Yogyakarta	739.999.064.237,58	1.517.599.468.488,39	49%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			57%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Tabel 20. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Tahun 2021

TAHUN 2021			
Wilayah	Total Belanja Pembangunan	Total Belanja	Rasio
Provinsi DI Yogyakarta	2.274.375.287.540	5.530.173.461.667	41%
Kab. Bantul	345.139.216.235	2.226.588.267.595	16%
Kab. Gunung Kidul	376.630.058.406	1.918.206.530.997	20%
Kab. Kulon Progo	270.410.122.761	1.499.994.321.770	18%
Kab. Sleman	448.169.388.282	2.714.312.898.540	17%
Kota Yogyakarta	82.868.058.065	1.691.968.885.089	5%
Rata-Rata Total Rasio per Tahun			19%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 18, 19 dan 20 diatas maka dapat diketahui bahwa rasio belanja pembangunan cukup beragam di masing-masing pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Di tahun 2019 rata-rata total rasio sebesar 51% dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta menempati posisi pertama sebesar 55%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata total nilai rasio menjadi 51%. Sedangkan di tahun 2021 rata-rata total rasio belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi 19%. Jika dihitung rata-rata total rasio belanja rutin dan belanja pembangunan dalam kurun waktu 2019-2021 maka rata-rata total rasio belanja rutin sebesar 58% dan rata-rata total rasio belanja pembangunan sebesar 42%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata prioritas belanja rutin lebih besar daripada prioritas belanja pembangunan Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi D.I Yogyakarta.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Adapun Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I

Yogyakarta ditunjukkan pada tabel berikut:



Gambar 2. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta 2019-2021

Pada gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan secara drastis dibawah 0% (minus), kecuali Kabupaten Kulonprogo meskipun mengalami penurunan pertumbuhan namun masih diatas 0% yakni sebesar 6,96% di tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami penurunan hingga menyebabkan resesi di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun setelah itu, pertumbuhan menuju angka positif di tahun 2021 meskipun tidak lebih baik dari tahun 2019, kecuali Kabupaten Kulonprogo.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dan diukur melalui rasio kinerja dari keuangan daerah, maka sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong Rendah Dengan rata-rata total rasio berada pada interval 25 – 50 % yakni pada tahun 2019 sebesar 39,9%,

tahun 2020 sebesar 36,3%, dan tahun 2021 sebesar 35,7%.

2. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efisiensi tergolong Efisien, karena dengan rata – rata kurang dari 100% yakni pada tahun 2019 total rata-rata Rasio Efisiensi sebesar 99,1%, tahun 2020 sebesar 96,5%, tahun 2021 sebesar 97,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta dalam hal ini baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
3. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas tergolong fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rata – rata total Rasio Efektivitas sebesar 110%, tahun 2020 sebesar 91,9%, tahun 2021 sebesar 109%.
4. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian bahwa secara rata-rata prioritas belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan dimana rata-rata total rasio belanja rutin lebih tinggi yakni 58% daripada belanja pembangunan yang sebesar 42%.
5. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan secara Fluktuatif. Di tahun 2019 Rasio pertumbuhan adalah positif, pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan secara drastis dibawah 0% (minus), kecuali kecuali Kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut sejalan dengan kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami penurunan hingga menyebabkan resesi di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada 2021 kembali naik namun tidak lebih baik dari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Digdowiseiso, Kumba dan Dimas Kaliwattu. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
- Siswanto dan Dita Asri Maylani (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>
- Mahsun, Mohamad. (2003). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFEdalam Widiyanti Agnes et al. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tegal
- Fathah, Rigel Nurul. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*. 8(1), Juni 2017
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. (2016). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta : Salemba Empat.